

**EFEKTIVITAS DAN POTENSI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*Life Skills*)
BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH
DI KABUPATEN GOWA**

THESIS



**NAMA : Rospinah
STAMBUK : PO203206516**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

**EFEKTIVITAS DAN POTENSI PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*Life Skills*)
BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH
DI KABUPATEN GOWA**

T H E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Perencanaan Pendidikan**

Disusun dan diajukan oleh :

**ROSPINAH
PO203206516**

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PRAKATA

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan kehendak-Nya, sehingga penulisan thesis ini dengan judul **"EFEKTIVITAS DAN POTENSI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*Life Skills*) BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN GOWA"** dapat sampai pada tahap penyelesaian sebagai upaya memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, dan sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan thesis ini cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2. Ketua Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah/Perencanaan Pendidikan Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf pengajar yang telah mentransformasi ilmu pengatahuannya.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Heryanto, selaku Ketua Komisi Penasehat dan Ibu Dr. Ir. Ria Wikantari, M.Arch, selaku Anggota Komisi Penasehat, atas segala dukungan dan bimbingannya.
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
5. Seluruh rekan-rekan dan sahabat penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungannya, baik langsung maupun tidak langsung selama pelaksanaan penelitian.

Akhirnya teristimewa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang dengan penuh kesabaran memberikan dukungannya, hingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkahNya kepada kita semua, Amin.

Makassar, Juli 2008

(Rospinah)

ABSTRAK

ROSPINAH. Efektivitas dan Potensi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Bagi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Bambang Heryanto dan Ria Wikantari).

Tujuan penelitian ini adalah untuk; (1) mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup bagi anak putus sekolah di Kabupaten Gowa, dan (2) mengetahui potensi wilayah yang mendukung pelaksanaan program *Life Skills* di Kabupaten Gowa.

Penelitian dilaksanakan dari Bulan April sampai Juli 2008 di Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah eksplanatoris, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Analisis data menggunakan *skala likert*.

Hasil penelitian menunjukkan; (1) indikator efektivitas program *Life Skills* yang paling tinggi adalah menekan tingkat pengangguran, sementara indikator; peningkatan produksi, pemasaran hasil usaha, dan peningkatan penghasilan ekonomi dinilai kurang efektif. (2) Efektivitas pelaksanaan program *Life Skills* di Kecamatan Pallangga terjadi pada indikator diversifikasi usaha, dan di Kecamatan Pallangga diperoleh pada indikator diversifikasi usaha dan kesesuaian produk dengan kecakapan hidup. Indikator yang lain, yaitu; pemasaran produk secara kontinyu, lokasi pemasaran, dan kemandirian PKBM memiliki nilai kurang efektif. (3) Potensi wilayah yang mendukung program *Life Skills* sangat efektif meningkatkan pendidikan secara non-formal dan prasarana. Nilai efektif diperoleh pada indikator penyerapan tenaga kerja, dan nilai kurang efektif pada indikator; kesesuaian jenis kecakapan hidup yang dikembangkan dengan daya dukung sumberdaya lokal, ketersediaan sarana, dukungan kebijakan, dan dukungan kelembagaan. (4) Diperlukan re-desain pengembang program pendidikan kecakapan hidup sehingga bersinergis dengan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Gowa.

ABSTRACT

ROSPINAH. Efektivitas dan Potensi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Bagi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Bambang Heryanto dan Ria Wikantari).

Tujuan penelitian ini adalah untuk; (1) mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bagi anak putus sekolah di Kabupaten Gowa, dan (2) mengetahui potensi wilayah yang mendukung pelaksanaan program *Life Skills* di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan April sampai dengan bulan Juli 2008 di Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif. Teknik analisis data menggunakan *skala likert* (sebagai salah satu skala sikap), dipakai untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program dan potensi wilayah yang mendukung pengembangan *Life Skills* di Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) indikator efektivitas program *Life Skills* yang paling tinggi adalah menekan tingkat pengangguran, sementara indikator yang lain; peningkatan produksi, pemasaran hasil usaha, dan peningkatan penghasilan ekonomi dinilai kurang efektif. (2) Efektivitas pelaksanaan program *Life Skills* di Kecamatan Pallangga hanya diperoleh pada indikator diversifikasi usaha, dan di Kecamatan Pallangga diperoleh efektivitas pelaksanaan program pada dua indikator, yakni diversifikasi usaha dan kesesuaian produk dengan kecakapan hidup yang dimiliki anggota PKBM. Indikator yang lain, yaitu; pemasaran produk secara kontinyu, lokasi pemasaran, dan kemandirian PKBM dinilai kurang efektif pelaksanaannya. (3) Potensi wilayah yang mendukung program *Life Skills* diperoleh bahwa program ini sangat efektif meningkatkan pendidikan secara non-formal dan sangat efektif apabila ditunjang dengan prasarana. Nilai efektif diperoleh pada indikator penyerapan tenaga kerja, sementara nilai kurang efektif diperoleh pada indikator; kesesuaian jenis kecakapan hidup yang dikembangkan dengan daya dukung sumberdaya lokal, ketersediaan sarana, dukungan kebijakan, dan dukungan kelembagaan. Program *Life Skills* belum sinergis dengan kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Gowa. (4) Diperlukan re-desain pengembang program yang diawali dengan menyusun langkah-langkah strategis, metode dan ciri-ciri pengembangan, dan menetapkan indikator efektivitas pada setiap langkah pengembangan program. PKBM mandiri merupakan sasaran akhir dalam proses re-desain dimana diharapkan program pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Gowa dapat sinergis dengan daya dukung sumberdaya lokal dan bersinergis dengan kebijakan pengembangan wilayah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PRAKATA	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah	6
I.3. Tujuan Penulisan	6
I.4. Manfaat Penelitian	7
I.5. Lingkup Penelitian.....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.....	9
II.2. Kebijakan Pendidikan	12
II.3. Pendidikan Keterampilan Hidup	14
II.4. Konsep Kelembagaan/Institusi.....	18
II.5. Konsep Pengembangan Kapasitas.....	21
II.6. Teori Lokasi.....	25
II.7. Kerangka Pikir.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

III.1. Jenis dan Desain Penelitian	31
III.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
III.3. Populasi dan Sampel	32
III.4. Jenis dan Sumber Data	36
III.5. Teknik Pengumpulan Data	37
III.6. Analisis Data	37
III.7. Konsep Operasional	39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1. Kondisi Geografis dan Demografis Lokasi Penelitian	46
IV.2. Kebijakan Pendidikan dan Program Pendidikan Kecakapan Hidup di Kabupaten Gowa.....	48
IV.3. Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Mitra Kerja.....	51
IV.4. Efektivitas Pengembangan PKBM di Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa	55
IV.5. Efektivitas dan Potensi Pengembangan PKBM, serta Sinergitas dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah	83
IV.6. Re-Desaian Strategi Pengembangan PKBM.....	114

BAB V. PENUTUP

V.1. Kesimpulan.....	119
V.2. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA	121
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
1. Tabel II.1	Penduduk Berumur 7 -24 Tahun yang Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kab. Gowa.....	14
2. Tabel III.1	Data kelompok <i>life skills</i> di Kabupaten Gowa.....	33
3. Tabel III.2.	Data kelompok <i>life skills</i> populasi terpilih.....	35
4. Tabel IV.1.	Gambaran Angkatan Kerja dan Pengangguran Di Kabupaten Gowa Tahun 2004-2006.....	48
5. Tabel IV.2.	Tanggapan Tentang Perbandingan Efektivitas Program Pendidikan Kecakapan Hidup (<i>Life Skills</i>) dalam menurunkan tingkat pengangguran di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	57
6. Tabel IV.3.	Tanggapan Tentang Efektivitas Pengembangan Usaha PKBM Dilihat dari Peningkatan Produksi di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	61
7. Tabel IV.4.	Gambaran Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gowa Tahun 2005-2006.....	63
8. Tabel IV.5.	Tanggapan Tentang Peningkatan Penghasilan Ekonomi Masyarakat di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	64
9. Tabel IV.6.	Tanggapan Tentang Pemasaran Hasil Usaha Secara Kontinyu PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	66
10. Tabel IV.7.	Tanggapan Tentang Kesesuaian Kegiatan Produksi yang Dikembangkan dengan Keterampilan yang Dimiliki Anggota PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	69

11. Tabel IV.8. Tanggapan Tentang Jumlah Produksi yang Dihasilkan PKBM di Kecamatan Pallangga Sudah Memenuhi Target Pemasaran Hasil Usaha di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	73
12. Tabel IV.9. Tanggapan Tentang Kesesuaian Jenis Produksi yang Dihasilkan PKBM dengan Lokasi Pemasaran di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa....	76
13. Tabel IV.10. Tanggapan Tentang Keperluan Diversifikasi Jenis Keterampilan yang Dikembangkan PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa	78
14. Tabel IV.11. Tanggapan Tentang Kemandirian PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong dalam Mengembangkan Jenis Keterampilan dan Produk yang Dihasilkan.....	80
15. Tabel IV.12. Tanggapan Tentang Jenis Keterampilan yang Dikembangkan PKBM Sudah Sesuai dengan Daya Dukung SDA di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	84
16. Tabel IV.13. Tanggapan Tentang Jenis Keterampilan yang Dikembangkan PKBM Sudah Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Secara Non-Formal di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	89
17. Tabel IV.14. Tanggapan Tentang Efektivitas PKBM dalam Menyerap Tenaga Kerja Secara Optimal di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	91
18. Tabel IV.15. Tanggapan Tentang Ketersediaan Sarana PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong dalam Peningkatan Jumlah Produksi dan Pengembangan Usaha.....	93
19. Tabel IV.16. Tanggapan Tentang Perlunya Ketersediaan Prasarana PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong dalam Mendukung Jumlah Produksi dan Pengembangan Usaha.....	97
20. Tabel IV.17. Tanggapan Tentang Efektivitas Dukungan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.	101

21. Tabel IV.18. Tanggapan Tentang Efektivitas Keterlibatan Kelembagaan-kelembagaan dalam Pengembangan PKBM Sudah Mendukung Kegiatan PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa	103
22. Tabel IV.19. Tanggapan Tentang Jenis Keterampilan yang Dikembangkan PKBM Sudah Sesuai dan Mendukung Pengembangan Wilayah di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	105
23. Tabel IV.20. Nilai Rata-rata Indikator Efektivitas Program Pendidikan Kecakapan Hidup di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	107
24. Tabel IV.21. Nilai Rata-rata Indikator Efektivitas Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	109
25. Tabel IV.22. Nilai Rata-rata Potensi Wilayah yang Mendukung Pelaksanaan Program Pendidikan Kecakapan Hidup di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa....	111
26. Tabel IV.23. Langkah-langkah dan Indikator Efektivitas Pengembangan PKBM di Kec. Pallangga dan Kec, Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	116

DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Halaman
1.	Gambar II.1. Kerangka Pikir Penelitian.....	30
2.	Gambar III.1. Peta Sebaran PKBM Berdasarkan Keterampilan dan Kelompok Sasaran Penelitian di Kabupaten Gowa.....	45
3.	Gambar IV.1. Alur Pengajuan Proposal, Penetapan Lembaga, dan Penyaluran DPK Program <i>Life Skills</i> PLS tahun 2003...	53
4.	Gambar IV.2. Alur Pembelajaran Program Kecakapan Hidup.....	54
5.	Gambar IV.3. Gambaran Tentang Perbandingan Efektivitas Program <i>Life Skills</i> dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	59
6.	Gambar IV.4. Gambaran Tentang Efektivitas Pengembangan Usaha PKBM Dilihat dari Peningkatan Produksi di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.	62
7.	Gambar IV.5. Gambaran Tentang Peningkatan Penghasilan Ekonomi Masyarakat di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	65
8.	Gambar IV.6. Gambaran Tentang Pemasaran Hasil Usaha Secara Kontinyu PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	68
9.	Gambar IV.7. Kegiatan Produksi dan Produk Jadi Kasur yang Dikembangkan PKBM Tunas Harapan Kecamatan Pallangga.....	71
10.	Gambar IV.8. Gambaran Tentang Kesesuaian Kegiatan Produksi yang Dikembangkan dengan Keterampilan yang Dimiliki Anggota PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	71

11. Gambar IV.9.	Gambaran Tentang Jumlah Produksi yang Dihasilkan PKBM di Kecamatan Pallangga Sudah Memenuhi Target Pemasaran Hasil Usaha di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	74
12. Gambar IV.10.	Jenis Keterampilan yang Dikembangkan PKBM Ramperibaji Kecamatan Tinggimoncong.....	75
13. Gambar IV.11.	Gambaran Tentang Kesesuaian Jenis Produksi yang Dihasilkan PKBM dengan Lokasi Pemasaran di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	77
14. Gambar IV.12.	Gambaran Tentang Keperluan Diversifikasi Jenis Keterampilan yang Dikembangkan PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	79
15. Gambar IV.13.	Gambaran Tentang Kemandirian PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong dalam Mengembangkan Jenis Keterampilan dan Produk yang Dihasilkan.....	81
16. Gambar IV.14.	Gambaran Tentang Jenis Keterampilan yang Dikembangkan PKBM Sudah Sesuai dengan Daya Dukung SDA di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	87
17. Gambar IV.15.	Gambaran Tentang Jenis Keterampilan yang Dikembangkan PKBM Sudah Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Secara Non-Formal di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	90
18. Gambar IV.16.	Gambaran Tentang Efektivitas PKBM dalam Menyerap Tenaga Kerja Secara Optimal di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	92
19. Gambar IV.17.	Gambaran Tentang Ketersediaan Sarana PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong dalam Peningkatan Jumlah Produksi dan Pengembangan Usaha.....	95

20. Gambar IV.18.	Gambaran Tentang Perlunya Ketersediaan Prasarana PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong dalam Mendukung Jumlah Produksi dan Pengembangan Usaha.....	98
22. Gambar IV.19.	Gambaran Tentang Efektivitas Dukungan Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	102
22. Gambar IV.20.	Gambaran Tentang Efektivitas Keterlibatan Kelembagaan-kelembagaan dalam Pengembangan PKBM Sudah Mendukung Kegiatan PKBM di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	104
23. Gambar IV.21.	Gambaran Tentang Jenis Keterampilan yang Dikembangkan PKBM Sudah Sesuai dan Mendukung Pengembangan Wilayah di Kec. Pallangga dan Kec. Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	106



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PROGRAM PASCASARJANA**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245 TELP : (0411) 585034, 585036 FAX. : (0411) 585868
E-mail : pascauh@indosat.net.id

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Setelah memeriksa hasil penelitian mahasiswa berikut ini:

Nama : Rospinah
Nomor Pokok : P0203206516
Program Studi : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Konsentrasi : Perencanaan Pendidikan
Judul : **Efektivitas dan Potensi Pengembangan Pendidikan
Kecakapan Hidup (*Life Skills*) Bagi Anak Putus Sekolah di
Kabupaten Gowa**

Maka tim komisi penasehat tesis di bawah ini menyetujui bahwa mahasiswa tersebut di atas siap untuk melaksanakan seminar hasil penelitian.

Makassar, Juni 2008

Anggota Penasehat

Ketua Penasehat

Dr. Ir. Ria Wikantari, M.Arch

Prof. Dr. Ir. Bambang Heryanto

Mengetahui

Ketua Program Studi PPW-RENDIK

Dr. Ir. Roland A. Barkey, DEA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan wilayah merupakan perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral (biasanya kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan), dan pendekatan regional (merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Pada sektor pendidikan, perencanaan pembangunan wilayah sangat menentukan mutu dan sistem pendidikan yang akan dikembangkan dan dihasilkan, mengingat salah satu komponen yang terdapat dalam konsep perencanaan wilayah adalah mengatur aktivitas pada ruang wilayah, termasuk kegiatan pendidikan.

Suatu wilayah atau daerah dapat dikatakan prospek dan mempunyai aspek pembangunan yang menjanjikan bilamana potensi yang dimiliki cukup untuk dimanfaatkan bagi pembangunan daerah, dan dapat memakmurkan masyarakatnya. Perkembangan suatu wilayah biasanya dilandasi oleh produktivitas yang dicapai melalui kombinasi yang tepat antara sumberdaya produksi, seperti; potensi sumberdaya

alam, kualitas sumberdaya manusia/tenaga, ketersediaan/kesiapan modal, dan keterampilan.

Perencanaan pendidikan di Indonesia belum terintegrasi dengan kebijakan perencanaan dan pengembangan wilayah pada tataran implementasi. Kebijakan pembangunan pemerintah tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai sektor yang paling penting dalam mendukung pengembangan wilayah, padahal pengembangan suatu wilayah hanya dapat ditunjang oleh SDM yang memiliki tingkat pendidikan yang berkualitas dan profesional. Sampai saat ini, antara kebijakan pendidikan dengan kebijakan perencanaan wilayah masing-masing berjalan sendiri.

Kualitas pendidikan di Indonesia dikemukakan saat ini sangat menyedihkan. Berdasarkan angka *Human Development Index* bahwa mutu pendidikan Indonesia rendah. Diantara 174 negara, ranking Indonesia pada tahun 1998 menduduki urutan ke-105. Tahun 1999 merosot menjadi ranking 109, dan pada tahun 2004 menempati ranking ke-111 dari 177 negara (Akdon, 2006).

Sumber daya manusia (SDM) Indonesia ternyata kurang menguasai sains dan teknologi, dan kurang mampu secara manajerial. Produktivitas SDM Indonesia rendah disebabkan oleh kurang percaya diri, kurang kompetitif, kurang kreatif dan sulit berprakarsa sendiri (*selfstarter*), (Idrus. N, CIRD 1999). Hal itu disebabkan oleh sistem pendidikan yang kurang mengembangkan inovasi, kreativitas, dan belum menerapkan

sistem pengembangan pendidikan yang memiliki sinergitas dengan karakteristik wilayah.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia dewasa ini, Departemen Pendidikan Nasional telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya, antara lain dengan terus-menerus mengusahakan pemerataan/perluasan akses terhadap pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah dan masyarakat, sejalan dengan era desentralisasi pendidikan. Khusus berkenaan dengan mutu dan relevansi, disamping mengembangkan kurikulum pendidikan yang berbasis kompetensi, juga mengarahkan sistem pendidikan di berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan pada pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) melalui pendekatan pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat luas (*Broad Base Education*).

Pada tahun 2003, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dibidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda. Dana tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, yang tidak memiliki kecakapan hidup (*life skills*) melalui Program Pendidikan Luar Sekolah.

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) pada dasarnya merupakan suatu upaya pendidikan untuk meningkatkan kecakapan hidup yang dapat membantu seseorang membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi

secara efektif, mengembangkan pengelolaan diri/pribadi, maupun mengatasi masalah akibat perbedaan pendapat dengan kelompoknya, sehingga keterampilan hidup mengarah pada aksi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, bagi dirinya, maupun bagi lingkungan tempat dia berkiprah. Kecakapan hidup dapat dipilah menjadi empat jenis, yaitu; 1) kecakapan personal (*personal skills*), 2) kecakapan sosial (*sosial skills*), 3) kecakapan akademik (*academic skills*), dan 4) kecakapan vocational (*vocational skills*).

Upaya peningkatan pelayanan pendidikan non-formal terutama bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu/miskin, putus sekolah atau menganggur serta untuk memaksimalkan peran Lembaga Pendidikan (LP) yang ada didalam masyarakat diperlukan suatu kerja sama antara Ditjen PLS dengan LP yang memiliki kepedulian dalam Pendidikan Kecakapan Hidup. Dalam kerjasama ini diharapkan dapat dihasilkan suatu model pembelajaran/pelatihan yang tepat guna dan berdaya guna. Lembaga Pendidikan yang dimaksud adalah Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Terpadu Masyarakat, dan Organisasi Perempuan.

Perencanaan wilayah di Kabupaten Gowa khususnya pada sektor pendidikan diduga belum mengacu dan bersinergis dengan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang dapat mendukung pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Penyelenggaraan program *life skills* di Kabupaten Gowa harus mengacu dan bersinergis dengan perencanaan dan pengembangan wilayah. Suatu wilayah atau daerah dapat dikatakan prospek dan mempunyai aspek pembangunan yang menjanjikan bilamana potensi yang dimiliki cukup untuk dimanfaatkan bagi pembangunan daerah, dan dapat memakmurkan masyarakatnya. Perkembangan suatu wilayah biasanya dilandasi oleh produktivitas yang dicapai melalui kombinasi yang tepat antara sumberdaya produksi, seperti; sumberdaya alam, sumberdaya manusia/tenaga, ketersediaan/kesiapan modal, dan keterampilan.

Melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, program *life skills* di Kab. Gowa diharapkan dapat memberi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan keterampilan, sehingga setiap anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) program pendidikan luar sekolah dapat memberi kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.

Penelitian ini dilaksanakan pada dua lokasi kecamatan, yakni Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Tinggimoncong. Lokasi pelaksanaan studi ditentukan berdasarkan karakteristik jenis keterampilan yang dikembangkan masing-masing PKBM, dan berdasarkan jenis penelitian, yaitu untuk melihat efektivitas pelaksanaan program *life skills* di Kabupaten Gowa secara operasional dan menganalisis potensi atau

faktor-faktor yang menunjang pengembangan program ini. Sehingga penulis memiliki minat untuk melakukan penelitian yang diberi judul :

”EFEKTIVITAS DAN POTENSI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (*Life Skills*) BAGI ANAK PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN GOWA”

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bagi anak putus sekolah di Kabupaten Gowa ?
- b. Potensi wilayah apa yang mendukung pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) di Kabupaten Gowa ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bagi anak putus sekolah di Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui potensi wilayah yang mendukung pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup (*Life Skills*) di Kabupaten Gowa.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat terhadap Dunia Akademik

Dengan mengetahui aspek-aspek yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pendidikan kecakapan hidup masyarakat di Kabupaten Gowa, dan dengan adanya rumusan strategi serta desain model pendidikan kecakapan hidup, maka diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan mengenai pengembangan pendidikan kecakapan hidup bagi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada kecakapan hidup masyarakat.

b. Manfaat bagi Dunia Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para pengambil keputusan (*decision maker*) dan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam melakukan intervensi program pengembangan pendidikan, khususnya program pendidikan luar sekolah melalui peningkatan kecakapan hidup masyarakat.

1.5. Lingkup Penelitian

- a. Efektivitas pelaksanaan program *life skills* dengan memperhatikan potensi wilayah yang mendukung pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Gowa.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program *Life Skills* dalam mendukung kebijakan pembangunan di Kabupaten Gowa.
- c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengikuti program *life skills* dan yang tidak terlibat dalam kelompok *life skills* di Kabupaten Gowa.
- d. Kelompok-kelompok *life skills* dan jenis kecakapan hidup yang dikembangkan berdasarkan daya dukung potensi sumberdaya alam.
- e. Penelitian dilakukan di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Glasson (1975), mendefinisikan perencanaan dalam pengertian umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan masa depan. Perencanaan wilayah di Indonesia setidaknya memerlukan unsur-unsur yang urutan atau langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan permasalahan yang dihadapi, mungkin diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data primer, maupun data sekunder.
- b. Tetapkan visi, misi, dan tujuan umum. Visi, misi, dan tujuan umum haruslah merupakan kesepakatan sejak awal.
- c. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang.
- d. Proyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat dapat dikendalikan (*controllable*) maupun diluar jangkauan pengendalian pihak perencana (*non-controllable*).
- e. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur.

- f. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia.
- g. Memilih alternatif yang terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan.
- h. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
- i. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan wilayah (termasuk perencanaan pergerakan di dalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral biasanya kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan (*less-spatial*), sedangkan pendekatan regional lebih bersifat *spatial* dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang (Tarigan, 2006).

Untuk kebutuhan perencanaan wilayah di Indonesia, apa yang dikemukakan Menurut B.D. Nasendi, mengemukakan bahwa pengembangan wilayah adalah usaha meningkatkan dan mengembangkan hubungan interpendensi dan interaksi (saling membutuhkan dan saling menunjang) antara sistem manusia (*system social*) dengan sistem lingkungan hidup sumberdaya alamnya. Pengembangan wilayah

merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah.

Pengembangan wilayah mengandung arti luas, tetapi pada prinsipnya merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di suatu wilayah tertentu. Pengembangan wilayah diperlukan terhadap suatu daerah tertentu, biasanya terkait dengan masalah ketidakseimbangan demografi, tingginya biaya produksi, dan penurunan kualitas hidup masyarakat serta ketertinggalan pembangunan atau adanya kebutuhan yang sangat mendesak (Pinchemel, 1995).

Berkembangnya suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pemanfaatan dari ketiga sumberdaya tersebut, sehingga upaya pengembangan yang harus dilakukan akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jadi secara prinsipil bahwa proses pembangunan wilayah maupun sistem pengembangannya harus bertumpuh pada optimalisasi kemampuan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kemampuan teknologi, dan unsur digunakan bagi pelaksanaan pembangunan dalam suatu wilayah yang akan dikembangkan.

Perkembangan suatu wilayah biasanya dilandasi oleh produktivitas yang dicapai melalui kombinasi yang tepat antara sumberdaya produksi seperti; alam, tenaga, modal, dan keterampilan. Adapun strategi

peningkatan produksi dan pendapatan bertitik tolak pada permintaan akhir, meliputi; konsumen, investasi, dan kegiatan ekspor-impor.

B. Kebijakan Pendidikan

Ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat (1), yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Sunario, 2003, dalam Husain, 2006).

Pendidikan merupakan kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi, kecakapan dan karakteristik pribadi peserta didik. Kegiatan pendidikan diarahkan kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang yang disebut tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan minimal diarahkan kepada pencapaian empat sasaran, yaitu: 1) pengembangan segi-segi kepribadian, 2) pengembangan kemampuan kemasyarakatan, 3) pengembangan kemampuan melanjutkan studi, dan 4) pengembangan kecakapan dan kesiapan untuk bekerja (Nana Syaodih, 2007).

Lebih lanjut dikatakan (Nana Syaodih, 2007), pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berintikan interaksi antara peserta didik dengan para pendidik serta berbagai sumber pendidikan. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber-sumber pendidikan tersebut dapat berlangsung dalam situasi pergaulan (pendidikan), pengajaran, latihan, serta bimbingan. Dalam pergaulan antara peserta didik dengan para pendidik yang dikembangkan terutama segi-segi afektif; nilai, sikap, minat, motivasi, disiplin diri, kebiasaan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil sementara Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2005, untuk sektor pendidikan di Kabupaten Gowa tercatat bahwa dari penduduk berumur 10 tahun keatas yang menamatkan pendidikannya di Kabupaten Gowa sekitar 18, 21 persen tidak pernah sekolah, 18,55 persen yang masih sekolah, dan 63,24 persen sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata hampir 42,00 persen tidak/belum tamat SD. Penduduk yang menamatkan SD, SLTP, dan SLTA mencapai 53,71 persen.

Tabel No. II.1.

**Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Masih Bersekolah Menurut
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kab. Gowa.**

GOLONGAN UMUR	TINGKAT PENDIDIKAN				TOTAL
	SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA I KE ATAS	
7 – 12 Tahun	67.099	2.151	-	-	69.250
♂ Laki-laki	36.761	1.567	-	-	38.328
♀ Perempuan	30.338	584	-	-	30.922
13 – 12 Tahun	4.415	19.231	1.613	-	25.259
♂ Laki-laki	2.516	11.301	714	-	14.531
♀ Perempuan	1.899	7.930	899	-	10.728
13 – 12 Tahun	-	2.735	9.132	189	12.056
♂ Laki-laki	-	1.168	4.638	0	5.806
♀ Perempuan	-	1.567	4.494	189	6.250
13 – 12 Tahun	-	-	1.426	2.379	3.805
♂ Laki-laki	-	-	898	962	1.860
♀ Perempuan	-	-	528	1.417	1.945

Sumber : *Angka Sementara (SUSENAS) 2005 di Kab. Gowa.*

C. Pendidikan Ketarampilan Hidup (*Life Skill*)

Menurut WHO, *Life Skill* adalah kemampuan perilaku positif dan adaptif yang mendukung seseorang untuk secara efektif mengatasi tuntutan dan tantangan selama hidupnya. Dalam Undang-undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat (3), disebutkan bahwa LSE digolongkan sebagai pendidikan non-formal, yang memberikan keterampilan personal, sosial, intelektual/akademis dan vokasional untuk bekerja secara mandiri.

UNICEF mendefinisikan *Life Skill* sebagai sesuatu yang lebih detail lagi dengan menggunakan tambahan *based education*. *Life Skill-based Education* adalah pendekatan pengembangan perilaku atau perubahan perilaku antara pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin pesat di negeri ini, terlihat kenyataan ketidakseimbangan yang mencolok antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Dari data dasar Program Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda tahun 2003, hasil pertemuan dengan Kasubdin PLS/P di Solo Jawa Tengah yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2003, dari jumlah penduduk Indonesia yaitu 189.078.857 jiwa, terdapat 12,81 persen atau 24.217.958 warga masyarakat kategori usia produktif (14-35 tahun) yang tergolong pengangguran. Di kawasan timur Indonesia (Regional V) yang penduduknya berjumlah 19.636.696 jiwa, terdapat 3.556.760 yang menganggur atau 18,11 persen, khusus di Sulawesi Selatan yang penduduknya berjumlah 7.980.991 jiwa tercatat 1.852.978 atau 23,22 persen adalah pengangguran. Dari data yang tercantum di atas menunjukkan bahwa dalam setahun saja telah terjadi peningkatan pengangguran yang sangat drastis di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 21,98 persen (data tahun 2002, dari 7.758.547 jumlah penduduk yang menganggur 96.301 orang atau 1,24 persen), (Data Dasar Program Pendidikan Luar Sekolah & Pemuda Tahun 2003, hasil pertemuan dengan Kasubdin PLS/P Se Indonesia di Solo Jawa Tengah, Agustus 2003).

Gagasan tentang pendidikan kecakapan hidup bukanlah sesuatu yang baru, meskipun konsep pendidikan berorientasi kecakapan hidup baru digulirkan di Indonesia sejak dua tahun terakhir. Menurut Santoso S. Hamijoyo (2002), gagasan tentang pendidikan kecakapan hidup telah

dimulai oleh UNESCO pada tahun 1949 melalui konsep *Functional Literacy*. Gagasan pokok dari konsep tersebut adalah agar kemampuan baca-tulis-hitung dapat berfungsi memberi manfaat bagi yang bersangkutan untuk keluar dari tiga kesengsaraan, yaitu; kebodohan (*ignorance*), kepenyakit (*ill-health*) dan kemelaratan (*poverty*).

Pentingnya pembekalan kecakapan hidup terhadap peserta didik telah mendapat pengakuan dari para pakar yang berkecimpung di dunia pendidikan. Penegasan tentang pentingnya kecakapan hidup dapat dilihat pada Pokok-pokok Deklarasi Dakar tahun 2000 tentang Pendidikan Untuk Semua (Fasli Jalal, 2004) yang menunjukkan adanya hak bagi setiap warga negara, baik anak-anak maupun orang dewasa, untuk memperoleh kesempatan yang adil dalam mengikuti pendidikan kecakapan hidup, dan adanya kewajiban bagi setiap negara untuk menyediakan, memperbaiki, meningkatkan dan menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, terutama kecakapan hidup yang bersifat penting, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata.

kecakapan hidup merupakan serangkaian kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang agar dapat mengatasi berbagai persoalan yang ditemui dalam kehidupannya. Sejalan dengan pengertian ini, Malik Fadjar (2002) mendefinisikan kecakapan hidup sebagai kecakapan untuk bekerja selain kecakapan untuk berorientasi ke jalur akademik.

Pengertian lain dikemukakan oleh Tatang Amirin (Majalah Dinamika Pendidikan, 2002) yang menyatakan bahwa istilah *skill* sering diartikan sebagai keterampilan, padahal keterampilan mempunyai makna yang sama dengan kecakapan fisik dan pekerjaan tangan. Hal ini menyebabkan *life skills* sering dimaknai hanya sebagai *vocational skill*, keterampilan kerja-kejuruan (pertukangan) atau kemampuan yang perlu dimiliki oleh peserta didik agar mereka dapat segera bekerja mencari nafkah untuk kehidupannya. Pemikiran Tatang Amirin didukung oleh Muchlas Samani (2002) yang menyatakan " Pengertian kecakapan hidup lebih luas dari keterampilan untuk bekerja. Baik orang yang bekerja maupun yang tidak bekerja tetap memerlukan kecakapan hidup, karena mereka pun menghadapi berbagai masalah yang harus dipecahkan. Setiap orang, dimanapun dan kapanpun, selalu menemui masalah yang memerlukan pemecahan ".

Menurut Ditjen Diklusepa (2003), hakikat pendidikan berorientasi kecakapan hidup di bidang PLS adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan yang memungkinkan peserta didik dapat hidup mandiri. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup di bidang PLS didasarkan atas prinsip lima pilar pendidikan, yaitu; *learning to know* (belajar untuk memperoleh pengetahuan), *learning to learn* (belajar untuk tahu cara belajar), *learning to do* (belajar untuk dapat berbuat/melakukan pekerjaan), *learning to be* (belajar agar dapat menjadi orang yang berguna sesuai dengan minat,

bakat dan potensi diri), dan *learning to live together* (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain). Berdasarkan prinsip lima pilar pendidikan di atas, peserta didik Program PBKH diharapkan mampu belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta membantu orang lain yang membutuhkannya.

D. Konsep Kelembagaan/Institusional

Kegiatan pengembangan kelembagaan ditujukan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan struktur organisasi dan tata kerja sesuai dengan situasi, kondisi dan peraturan-perundangan yang ada, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan dan tata kerja organisasi (PERFORM, 2003). Lembaga atau organisasi merupakan suatu sistem dan bentuk hubungan antara wewenang dan tanggung jawab, antara atasan dan bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang paling efisien (F.X. Soejadi, 1995).

Secara umum organisasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu organisasi pemerintah atau yang lebih dikenal dengan organisasi publik, organisasi bisnis, dan organisasi non profit. Ketiga tipe ini dapat dibedakan dari aspek tujuan pembentukan, aspek legalitas serta kegiatan yang dilaksanakan (PERFORM, 2003).

Pengembangan kelembagaan penting untuk dilaksanakan, baik dilingkungan organisasi publik, bisnis dan organisasi non-profit. Maksud dan tujuannya, pertama adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih efektif dan efisien, kedua adanya perubahan (teknologi, politik, sosbud) yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi yang bersangkutan (Nawawi, 2000).

Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan organisasi diperlukan serangkaian kegiatan untuk mendinamisasi gerak struktur organisasi. Struktur organisasi atau yang biasa disebut bagan organisasi ialah suatu lukisan yang dimaksudkan untuk menggambarkan susunan organisasi baik mengenai fungsi-fungsinya, bidang-bidang pekerjaannya maupun mengenai tingkatan-tingkatannya atau *eselonering*, rentang kendali (F.X. Soejadi, 1998).

Ada berbagai defenisi institusional yang disampaikan oleh ahli dari berbagai bidang. Yaitu :

- a) Ruttan dan Hayami, mendefinisikan bahwa institusi adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
- b) Nabli dan Nugent, mengemukakan bahwa institusi adalah sekumpulan batasan atau faktor pengendali yang mengatur hubungan perilaku

antar anggota atau antar kelompok. Dengan defenisi ini kebanyakan organisasi umumnya dalah institusi karena organisasi umumnya mempunyai aturan yang mengatur hubungan antar anggota maupun dengan orang lain di luar organisasi itu.

- c) Williamson, meyakini bahwa institusi adalah mencakup penataan institusi (*institutional arrangement*) untuk memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit ini apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku ekonomi di mana ada kontrak atau transaksi yang dilakukan dan tujuan utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi.

Pada umumnya defenisi institusi mencakup konsep pola perilaku sosial yang sudah mengakar dan berlangsung terus menerus atau berulang. Dalam hal ini sangat perlu diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berfikir positif kearah norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka.

Dalam perspektif ilmu adminisitrasi dan manajemen, menurut Thoha (1993), bahwa kelembagaan adalah organisasi yang terdiri dari unit-unit kerja, dimana unit-unit kerja terdiri dari beberapa jabatan. Tentunya berdasarkan jabatan yang ada dalam unit, maka pekerjaan akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dari jabatan tersebut.

E. Konsep Pengembangan Kapasitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), bahwa kapasitas adalah kemampuan (kesanggupan, kecakapan) yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki akan dapat berfungsi dan memproduksi secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

Pada kondisi institusional yang sangat lemah, maka muncul inisiatif untuk meningkatkan kemampuan lembaga melalui “*capacity building*”. Pengembangan kapasitas (*capacity building*) sering didefinisikan sebagai *as the process by which individuals, groups and organizations improve their ability to carry out their functions and achieve desired results over time. This definition highlights two important points: that capacity building is largely an internal process of growth and development, and that capacity-development efforts should be results oriented* (Morgan, 1997).

Pengembangan kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, responsivitas kinerja lembaga (BAPPENAS, 2001), dengan memusatkan perhatian pada dimensi : (1.) pengembangan sumberdaya manusia; (2.) penguatan organisasi; dan (3.) reformasi institusional (Grindle, 1997). Menurut A. Fiszbein (1997), peningkatan kemampuan difokuskan pada : (1) kemampuan tenaga kerja (*labor*); (2) kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan; dan (3) kemampuan “*capital*” yang diwujudkan dalam bentuk dukungan

sumberdaya, sarana, dan prasarana. Sementara itu, D. Eade (1998) merumuskan peningkatan kemampuan dalam tiga dimensi, yaitu: (1) individu; (2) organisasi; dan (3) *network*. Nampaknya pengembangan dimensi individu dan organisasi merupakan kunci utama atau titik strategis bagi perbaikan kinerja (Mentz,1997), tetapi masuknya dimensi *network* ini sangat penting karena melalui dimensi ini individu dan organisasi dapat belajar mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya (lihat Keban, 2000).

J. S. Edralin (1997) juga mengumpulkan berbagai pendapat yang menggambarkan pemahaman tentang "*capacity building*". Misalnya, World Bank memfokuskan peningkatan kemampuan kepada: (1) pengembangan sumberdaya manusia, khususnya training, rekrutmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial dan teknis; (2) organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses, sumberdaya, dan gaya manajemen; (3) jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan interaksi formal dan informal; (4) lingkungan organisasi, yaitu aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan dan anggaran; dan (5) lingkungan kegiatan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja. Dan United Nations memusatkan perhatiannya kepada: (1) mandat atau struktur legal;

(2) struktur kelembagaan; (3) pendekatan manajerial; (4) kemampuan organisasional dan teknis; (5) kemampuan fiskal lokal; dan (6) kegiatan-kegiatan program (lihat Edralin,1997 : 148–149). Sementara itu, UNDP memfokuskan pada tiga dimensi yaitu: (1) tenaga kerja (dimensi sumberdaya manusia), yaitu kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan; (2) modal (dimensi fisik) yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, dan gedung; dan (3) teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi, serta sistem informasi manajemen. (UNDP,1998)

Umumnya semua konsep dan definisi tersebut mengacu pada kemampuan-kemampuan individu atau organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, kapasitas berarti lebih dari sekadar kompetensi teknis, atau ketersediaan sumber daya keuangan dan materiil yang memadai. Konsep kapasitas tersebut termasuk bagaimana masukan (*input*) dipergunakan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan mencapai hasil tertentu. Banyak penulis menganggap kapasitas sebagai sesuatu yang bersifat dinamis, multidimensi, dan secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual (Brown *et.al* 2001). Kapasitas dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan khusus dengan tugas, dan batasanbatasan kapasitas bersifat spesifik karena berkaitan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu jangka waktu tertentu (Milen, 2001). Kapasitas dapat memiliki konotasi

kuantitatif, tetapi seringkali dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan kualitatif. Kapasitas dapat dilihat baik sebagai suatu proses maupun sebagai hasil (Rohdewohld & Poppe, 2005).

Dalam konteks pengembangan sumberdaya manusia, perhatian diberikan pada pengadaan atau penyediaan personel yang profesional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain training, pemberisn upah/gaji, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sisitem rekrutmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan penganggaran struktur mikro. Aktivitas yang harus dilakukan adalah menata sistem insentif, pemanfaatan personel yang ada, kepemimpinan, komunikasi, dan struktur manajerial. Dan berkenaan dengan refotmasi institusional, perlu diberi perhatian terhadap perubahan sistem dan institusi-institusi yang ada, serta pengaruh struktur makro (Grindle, 1997). Dalam hal ini, aktivitas yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan “aturan main” dari sistem ekonomi dan poltik yang ada, perubahan kebijakan dan aturan hukum, serta reformasi sistem kelembagaan yang dapat mendorong berkembangnya masyarakat madani (Keban, 2000).

Pengembangan kapasitas harus meliputi berbagai tingkatan yang berbeda, yaitu tingkatan individu, tingkatan kelembagaan (organisasi), dan tingkatan sistem (UNDP, 1998). Ketiga tingkatan tersebut saling bergantung : perubahan pada satu tingkatan akan memiliki dampak pada

tingkatan-tingkatan yang lain. Begitu juga pengembangan kapasitas pada suatu tingkatan intervensi akan berpengaruh pada kapasitas tingkatan intervensi lainnya (BAPPENAS, 2001) :

- a) tingkatan sistem, seperti misalnya kerangka peraturan, kebijakan, dan kondisi lingkungan yang mendukung atau menghambat pencapaian tujuan kebijakan tertentu
- b) tingkatan lembaga, yakni struktur organisasi, proses pengambilan keputusan dalam organisasi, tata cara dan mekanisme kerja, instrumen pengelolaan, hubungan dan jaringan antar organisasi
- c) tingkatan individu, yakni kemampuan dan kualifikasi individu, pengetahuan, sikap, etos kerja dan motivasi dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

F. Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial (Tarigan, 2006).

Lebih lanjut dikatakan Tarigan (2006), terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi

lain di sekitarnya. Tingkat aksesibilitas antara lain dipengaruhi oleh jarak, kondisi perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensi dan tingkat keamanan serta kenyamanan melalui jalur tersebut.

Weber (1909), mendasarkan teorinya bahwa pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimalisasi biaya. Dikatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat dimana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum.

Losch (1939), dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris (1954) dengan judul *The Economic of Location*, mengatakan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari pasar, konsumen makin enggan membeli karena transportasi untuk mendatangi tempat penjualan (pasar) semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar.

Bila teori ini digunakan untuk melihat efektivitas pendidikan keterampilan hidup di Kabupaten Gowa, maka kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam PKBM pada masing-masing wilayah/kecamatan dianggap sebagai produsen (penghasil produk) dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar (konsumen).

Mc Grone (1969), berpendapat bahwa teori lokasi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan sulit ditangani dalam keadaan ketidakpastian yang tinggi dan dalam analisis dinamik. Ketidaksempurnaan pengetahuan dan ketidakpastian biaya dan pendapatan dimasa depan pada tiap lokasi, biaya relokasi yang tinggi, preferensi personal, dan pertimbangan lain membuat model maksimisasi keuntungan lokasi sulit dioperasikan.

Menurut Isard (1956), masalah lokasi merupakan penyeimbangan antara biaya dengan pendapatan yang dihadapkan pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-beda. Keuntungan relatif dari lokasi bisa saja sangat dipengaruhi pada tiap waktu oleh faktor dasar; a) biaya *input* atau bahan baku, b) biaya transportasi, dan c) keuntungan aglomerasi. Diantara berbagai biaya tersebut, jarak dan aksesibilitas tampaknya merupakan pilihan terpenting dalam konteks tata ruang.

Ricahrdson (1969), mengemukakan bahwa aktivitas ekonomi atau perusahaan cenderung untuk berlokasi pada pusat kegiatan sebagai usaha mengurangi ketidakpastian dalam keputusan yang diambil guna meminimalkan resiko.

Dalam rancangan penelitian yang akan dilaksanakan, kesesuaian lokasi sangat diperhatikan. Kesesuaian lokasi yang dimaksud adalah integrasi antara lokasi pengembangan PKBM dilihat dari populasi masyarakat, aksesibilitas lokasi sumberdaya alam lokal yang dimanfaatkan, dan lokasi tujuan pemasaran hasil-hasil produksi PKBM.

G. Kerangka Pikir

Untuk melakukan proses analisis dan menemukan potensi pengembangan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) bagi anak putus sekolah di Kabupaten Gowa, maka tahapan awal yang akan dilakukan yakni menetapkan indikator penilaian efektivitas pendidikan kecakapan hidup di Kabupaten Gowa. Indikator efektivitas program yang dimaksud, yakni; menekan tingkat pengangguran, peningkatan produksi usaha PKBM, peningkatan penghasilan anggota PKBM, dan pemasaran hasil produksi. Tahapan selanjutnya adalah menginventarisasi jenis-jenis keterampilan yang dikembangkan oleh masing-masing Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

PKBM sebagai kelompok masyarakat yang mengembangkan kecakapan hidup yang telah terbentuk, selanjutnya dilihat/diukur tingkat efektivitas pelaksanaan programnya. Efektivitas pelaksanaan program yang dimaksud, antara lain; jenis kegiatan yang dikembangkan, kesesuaian produksi dengan lokasi pasar, diversifikasi kecakapan hidup, dan kemandirian kelompok. Selanjutnya, peneliti akan melihat potensi wilayah yang mendukung pelaksanaan program. Potensi wilayah yang mendukung pelaksanaan program yang dimaksud, antara lain; daya dukung sumberdaya alam, tingkat pendidikan masyarakat, sistem ketenagakerjaan, sarana, prasarana, kelembagaan, dan dukungan kebijakan.

Hasil dari penilaian/pengukuran efektivitas pelaksanaan program dan inventarisasi potensi wilayah yang mendukung pelaksanaan program, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis *skala likert*. Analisis data *skala likert* dipakai karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan melihat efektivitas pengembangan program *life skills* di Kabupaten Gowa. Hasil analisis data selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam membuat rumusan dalam melihat potensi pengembangan wilayah melalui pendidikan *life skills* di Kabupaten Gowa.

Gambar No. II.1
Kerangka Pikir Penelitian

